



# Kades Diminta Tertib Kelola Keuangan Desa

**SUNGAI RAYA** -- Pemerintah Kubu Raya membentengi seluruh kades yang ada di kabupaten itu dari penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa dengan sistem transaksi non tunai. "Adanya Inovasi kebijakan ini secara tak langsung akan membawa perubahan yang jauh lebih transparan dan akuntabel terutama dalam pengelolaan penggunaan dana desa," kata Muda Mahendrawan.

Muda menilai sistem transaksi nontunai lebih transparan dan akuntabel karena semua penggunaan dana desa dapat terekam dari seluruh transaksi penggunaan dan pendapatan yang masuk dan keluar dari rekening kas desa di bank. "Dengan sistem ini, setiap bulan print out bukti transaksi rekening koran disampaikan ke desa dan ke pemkab Kubu Raya, sehingga ini akan membentengi seluruh kades dari penyalahgunaan dana desa," kata, Muda Mahendrawan kepada wartawan, Senin (2/3) di Sungai Raya.

Seperti diketahui, Gagasan kebijakan terobosan Kubu Raya untuk percepatan wujudkan pengelolaan dana desa dan ADD secara nontunai melalui sistem Cash Management System (CMS) mulai diimplementasikan sejak tahun 2019. Kata Muda, pemerintah daerah setempat memiliki kewajiban mengawal dan melindungi hak rakyat desa atas pengelolaan dana desa agar menjamin dana desa digunakan sesuai dengan

peruntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan sesuai perencanaan dan kebutuhan prioritas yang telah disusun dan ditetapkan secara partisipatif ke dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa. Hal itu dilakukan untuk



Muda Mahendrawan

meminimalisir-menutup celah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan yang merugikan rakyat dan negara.

"Hal itu sekaligus menjamin pembayaran setoran Pajak PPH dan PPN dalam setiap transaksi penggunaan dana desa dan ADD karena

bisa langsung dibayarkan melalui transaksi non-Tunai CMS itu untuk langsung dipisahkan pembayarannya ke kas negara melalui KPP," katanya. Penerapan sistem CMS ini, lanjutnya demi langkah percepatan peningkatan kualitas taraf hidup

rakyat pedesaan mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pelayanan pemenuhan hak dasar rakyat yang jauh lebih baik dan berkeadilan.

Orang pertama di Pemerintahan Kubu Raya ini men-

gatakan, mulai tahun 2020 ini pengelola APBDes dengan sistem non-tunai dilakukan, dimana segala bentuk transaksi pembayaran baik untuk gaji tunjangan insentif, belanja barang dan jasa Kantor desa, belanja material ke pihak toko bangunan dan sebagainya, semua bisa langsung dilakukan oleh pihak desa melalui Kaur keuangan bersama Sekdes dan Kades sebagai pihak yang memberikan otorisasi.

"Dimanapun posisinya, asalkan ada jaringan internet, setiap Kades bisa meng-ACC atau mengesahkan proses transaksi pembayaran atau belanja-belanja desa ke pihak yang akan dikirim pembayaran nya yang sudah dibuat dulu daftar dan jumlah uang pembayaran oleh kaur keuan-

gan. Pembayaran itu akan langsung terlihat tertera di layar sistem aplikasi on line itu jadi kades setelah mengeceknya dan bila sudah benar maka kades akan langsung meng-entry pengesahan surat perintah pembayaran (SPP) ke Bank Kalbar melalui aplikasi on line CMS," paparnya.

Dengan penerapan sistem transaksi nontunai lanjutnya, Kades dan Kaur keuangan tidak perlu bolak balik ke Bank Kalbar ambil uang tunai. Karena, selain ngantre dan habiskan wktu juga jelas kurang aman karena uang tunai dalam jumlah lumayan besar tiap tahap pencairan dibawa pulang ke kampung tentu lah rawan dan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. (ash)